

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Jaufil Laili¹, Aura Bening Abdul Sani², Lalu Muhammad Izul Islami³.

^{1,2,3}Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, jaufillaili35@gmail.com

Abstrak: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai sistem etika yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Etika Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur dalam kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem etika sekaligus menegaskan manfaatnya dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Manfaat yang diharapkan adalah terwujudnya penguatan moralitas bangsa serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku etis sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan cara menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila secara utuh melalui peran keluarga, pendidikan formal, dan dukungan media edukatif dapat meminimalkan perilaku menyimpang, memperkuat integritas bangsa, serta membentuk masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat.

Kata Kunci: Pancasila, Sistem Etika, Moralitas Bangsa, Nilai-nilai, Masyarakat

Abstract: Pancasila as the foundation of the Indonesian state not only functions as a guideline for the Nation and state, but also as an ethical system that regulates people's behavior in everyday life. The ethics of Pancasila are derived from the noble values in the five principles, namely Belief In the One Almighty God, Just and Civilized Humanity, Unity of Indonesia, Democracy Guided By the Wisdom of Deliberation/Representation, and Social Justice for All Indonesian People. The purpose of this study is to deepen the understanding of Pancasila as an ethical system While emphasizing its benefits in building a just, prosperous, and dignified society. The Expected benefits are the realization of strengthening the nation's morality and the application Of Pancasila values in everyday ethical behavior. This study uses a literature study method by Collecting, reviewing, and analyzing various written sources such as books, journals, articles, And relevant documents. The results of the discussion show that the implementation of Pancasila as a whole through the role of the family, formal education, and support for Educational media can minimize deviant behavior, strengthen national integrity, and form a Harmonious, just, and dignified society.

Keywords: Pancasila, Ethical system, National morality, Values, Public

*Correspondence Address: jaufillaili35@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 November 2025

©HEBAT: Journal of Education

Lembaga Riset dan Publikasi

<https://ripubli.com/index.php/hebat>

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya memiliki fungsi sebagai panduan dalam bernegara, tetapi juga berperan penting sebagai sistem etika yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan dan perubahan nilai, Pancasila menjadi benteng moral yang membentuk karakter bangsa agar tetap berpegang pada jati diri dan budaya luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan.

Urgensi penelitian mengenai Pancasila sebagai sistem etika sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang dihadapkan pada berbagai masalah moral, sosial, dan politik. Fenomena seperti korupsi, intoleransi, ketidakadilan, serta krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai peran Pancasila sebagai sistem etika menjadi penting agar dapat dijadikan sebagai pedoman bersama dalam membangun bangsa yang bermartabat.

Selain itu, pentingnya penelitian ini juga terletak pada kontribusinya dalam memperkuat karakter bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman etis, diharapkan masyarakat Indonesia memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persatuan. Hal ini tidak hanya penting untuk membentuk individu yang berakhlak baik, tetapi juga untuk mendorong pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana peran dan implementasi Pancasila dapat menjadi landasan moral, pedoman bernegara, pembentuk karakter bangsa, serta instrumen dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk membahas Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Studi literatur adalah metode yang mengandalkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Menurut Zed (2004), studi literatur atau studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya. Zed menekankan bahwa studi literatur penting untuk membangun landasan teoritis yang kuat dalam suatu penelitian.

Penelitian ini juga akan meninjau pemikiran tokoh-tokoh penting dan kajian-kajian terkait yang membahas bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk moralitas bangsa Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan Pancasila di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral individu di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, menjadi dasar dalam membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir warga negara. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat

diharapkan mampu hidup berdampingan secara harmonis, menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila juga membantu membangun kesadaran moral dalam diri setiap individu agar selalu berbuat baik, menjunjung tinggi hak asasi, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Selain pada individu, peran etis Pancasila juga sangat terasa dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila menjadi pedoman dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama, sehingga tercipta kehidupan sosial yang rukun dan damai. Sementara dalam pemerintahan dan pembangunan nasional, Pancasila berfungsi sebagai arah dan dasar dalam merumuskan kebijakan publik, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, serta mengembangkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai nilai hidup yang terus dihayati dan diterapkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

A. Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat utama dari ajaran Pancasila yang bersifat universal dan menjadi pedoman bagi cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini tidak lahir begitu saja, tetapi tumbuh dari pengalaman, pemikiran, dan refleksi filosofis Bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Hal ini sesuai dengan pandangan Notonagoro, yang menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia dan memiliki sifat objektif serta normatif, sehingga mengikat secara moral seluruh warga negara. Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai norma dasar dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat sidang BPUPKI, Ir. Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah “Pancasila” sebagai nama bagi lima prinsip utama dasar negara, yang ia dapatkan atas saran seorang ahli bahasa. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila tidak hanya sebagai dasar hukum formal, tetapi juga sebagai arah moral dan tujuan utama pembangunan bangsa.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi filosofi yang menentukan bentuk dan arah pembangunan Indonesia. Filosofi bangsa ini lahir dari cita-cita bersama dan tidak dapat ditiru sepenuhnya oleh bangsa lain karena tiap negara memiliki jati diri, karakter, dan kepribadian yang berbeda. Menurut Soepomo, Pancasila mencerminkan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, berbeda dengan prinsip individualisme di Barat. Nilai-nilai dalam Pancasila meliputi nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, keindahan (estetis), serta nilai religius yang semuanya berakar pada budi nurani bangsa. Nilai-nilai ini kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai wujud penghormatan pada hak-hak individu sekaligus komitmen terhadap kehidupan bersama yang harmonis. Dengan begitu, Pancasila berfungsi sebagai panduan perilaku yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Lebih jauh, Pancasila sebagai filsafat bangsa memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sistem politik dan ekonominya, tetapi juga oleh kualitas karakter masyarakatnya, yang dalam konteks Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan dasar dalam sistem pendidikan, pemerintahan, dan pembangunan, agar generasi bangsa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara moral. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sehingga mampu membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, serta memiliki kesadaran kolektif untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar

hukum tertulis, tetapi juga menjadi landasan moral dan spiritual yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.

B. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang kebaikan dan keburukan perilaku manusia, serta hak dan kewajiban moral dalam kehidupan sosial. Etika lahir dari proses refleksi filsafat, sehingga sifatnya tidak hanya praktis tetapi juga teoretis. Unsur utama dalam etika adalah moral, yaitu seperangkat nilai yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Dalam pandangan Amri et al. (2018), etika mencakup nilai-nilai fundamental terkait moralitas yang berlaku dalam masyarakat, seperti prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Etika tidak memperhatikan kondisi fisik seseorang, melainkan fokus pada bagaimana seseorang bertindak dan menilai apakah tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, etika kerap dipahami sebagai tata krama atau perilaku baik yang sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam ilmu pengetahuan, etika dibedakan dari disiplin lain seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi, yang juga mempelajari moral tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Etika menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan karakteristik moral individu, sekaligus pendekatan preskriptif untuk memberikan penilaian dan rekomendasi atas tindakan manusia. Artinya, etika tidak hanya mencatat apa yang dilakukan manusia, tetapi juga menilai apakah tindakan itu baik atau buruk. Yulia & Dewi (2021) menegaskan bahwa etika mencakup budi pekerti yang baik, moralitas, dan tata krama yang luhur, yang pada akhirnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa etika memiliki fungsi sosial yang penting, yaitu menjaga kelangsungan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu.

Etika dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Hartati dan Firmansyah Putra (2019) menyatakan bahwa etika Pancasila dekat dengan konsep etika *keutamaan (virtue ethics)*, yang menekankan pengembangan karakter baik dalam diri manusia. Etika Pancasila juga mencakup ciri-ciri *deontologis* (kewajiban moral) dan *teleologis* (tujuan moral), tetapi unsur kebajikan lebih menonjol, terlihat dari sifat-sifat seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, ketabahan, dan keadilan. Etika Pancasila tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga menjadi bagian dari jati diri bangsa yang menekankan pentingnya keselarasan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

Selain itu, prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, integritas, komitmen, keadilan, kepedulian, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap kesepakatan merupakan nilai-nilai yang penting untuk diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan mencegah terjadinya konflik antar individu maupun kelompok. Dalam kehidupan berbangsa, nilai-nilai ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercapai keseimbangan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial (Julmulyani et al., 2021).

C. Pancasila Sebagai Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem nilai yang utuh. Setiap sila memiliki nilai intrinsik, tetapi keseluruhan sila membentuk landasan moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lahir dari tradisi, budaya, adat istiadat, dan keyakinan masyarakat

Indonesia. Setelah disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai itu tidak hanya menjadi pegangan moral masyarakat, tetapi juga memiliki nilai kenegaraan yang mengikat seluruh tatanan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya simbol formal negara, tetapi juga pedoman hidup yang membimbing setiap individu dalam bertindak secara etis dan bermoral.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila berperan sebagai panduan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter Pancasila, yaitu masyarakat yang tindakannya mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. penghayatan nilai-nilai Pancasila harus mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar masyarakat maupun dalam praktik pemerintahan. Seperti yang dijelaskan Kurniawan (2016), implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan wujud nyata dari etika Pancasila yang berfungsi sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan perilaku aparat negara harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tidak melenceng dari cita-cita bangsa.

Menurut pandangan Soeprapto (2013), etika Pancasila dapat dipahami dari berbagai sudut. Pertama, Pancasila merupakan etika keutamaan yang bersumber dari nilai-nilai moral asli Bangsa Indonesia. Etika keutamaan ini menekankan pengembangan sikap ketulusan, kesetiaan, kejujuran, dan kasih sayang yang tumbuh dari pengalaman hidup dan pembelajaran moral di masyarakat. Kedua, Pancasila juga berperan sebagai etika teleologis, yaitu panduan untuk mencapai tujuan bersama, seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Dalam konteks ini, pendalaman pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sangat penting agar perilaku individu maupun kolektif tidak keluar dari rel ideologi negara. Selain itu, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif maupun subjektif. Secara objektif, nilai-nilai Pancasila bersifat universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang secara prinsip dapat diterapkan di masyarakat mana pun meskipun dalam bentuk yang berbeda. sementara secara subjektif, nilai-nilai ini lahir dan berkembang dari refleksi, pemikiran kritis, dan pengalaman historis bangsa Indonesia, sehingga menjadi jati diri bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian nasional.

Etika kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila mencakup dimensi sosial dan budaya. Etika ini muncul dari rasa kemanusiaan yang mendalam, yang tercermin dalam sikap jujur, peduli, saling menghormati, menghargai perbedaan, mencintai sesama, dan saling membantu antar warga. Selain itu, etika ini menghidupkan kembali budaya malu, yaitu rasa malu untuk berbuat salah, mencederai nilai moral agama, dan melanggar norma budaya luhur bangsa. Dengan penerapan etika ini, diharapkan kehidupan sosial menjadi lebih harmonis, pemerintahan berjalan dengan penuh tanggung jawab, dan masyarakat mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Pancasila sebagai dasar etika tidak hanya menuntut pemenuhan hak-hak individu, tetapi juga menegaskan kewajiban moral untuk menjaga kebaikan bersama, membangun kesejahteraan, serta menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai persatuan. Karena itu, pengamalan Pancasila harus terus diperkuat di berbagai bidang kehidupan, baik melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, maupun pembiasaan dalam masyarakat.

D. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika dan Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam membentuk sistem etika yang diharapkan mampu memandu kehidupan sosial, politik, dan hukum dalam negara. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter bangsa. Namun, meskipun Pancasila telah disepakati sebagai landasan moral dan hukum negara, berbagai masalah sosial dan hukum yang sudah mengakar masih terus terjadi

masalah penggelapan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kesenjangan sosial, dan ketidakadilan hukum masih menjadi tantangan besar bagi negara. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah ketidakmampuan sebagian besar masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia sering kali melibatkan individu-individu yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat, yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang diajarkan oleh Pancasila. Dalam hal ini, penggelapan merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.

Selain itu, salah satu masalah yang menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah munculnya cara pandang yang mistis atau tidak rasional dalam menghadapi masalah sosial. Salah satu contohnya adalah tindakan terorisme yang sering kali menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut teori Etika Pancasila yang dikemukakan oleh Soeprapto (2013), Pancasila sebagai sistem etika harus berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas yang memmanifestasikan kebijaksanaan, keadilan, dan persatuan. Tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama dan kelompok tertentu justru mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta merusak prinsip dasar Pancasila yang mengutamakan kehidupan yang damai dan beradab. Teori teleologis dalam etika Pancasila juga menunjukkan bahwa tujuan dari penerapan Pancasila adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama yang adil dan beradab, namun cara pandang yang mistis dapat membuat individu atau kelompok terjebak dalam persepsi yang salah tentang keadilan, kebenaran, dan kebajikan.

Masalah kesenjangan sosial yang terus meluas antara kelompok kaya dan miskin juga mencerminkan ketidakmampuan sistem etika negara dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Ketidakadilan ini sering kali diperburuk dengan adanya ketidakadilan hukum, di mana hukum tidak selalu berpihak pada mereka yang lemah atau miskin. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai sistem etika harus mampu menjadi alat untuk mendekati kesenjangan ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hartati dan Firmansyah Putra (2019), etika Pancasila tidak hanya mengedepankan prinsip moralitas, tetapi juga bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum negara seharusnya dapat mengurangi ketidakadilan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menghadapi semua tantangan ini, penting bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan refleksi kritis terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Yulia dan Dewi (2021), etika Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman hidup yang bersifat rasional dan praktis. Masyarakat tidak boleh terjebak dalam cara pandang mistis atau dogmatis yang dapat menghalangi kemajuan dan perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila perlu diberikan sejak dini kepada generasi muda, agar mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memiliki integritas moral, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, etika Pancasila dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi terciptanya negara Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab.

E. Dinamika Pancasila Sebagai Sistem Etika

Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat melalui perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Sejak zaman Orde Lama hingga

masa Orde Baru, Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman etika mengalami adaptasi terhadap perubahan zaman. Pada masa Orde Lama, sistem politik dan sosial Indonesia masih dipenuhi dengan semangat demokrasi yang terbuka. Pemilu dilaksanakan dengan partisipasi banyak partai politik, yang mencerminkan keberagaman ideologi di masyarakat. Namun, meskipun terdapat banyak partai politik, Pancasila tetap menjadi dasar yang mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara, meski pada saat itu, terjadi ketegangan politik antara kelompok yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila harus mampu beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial agar tetap relevan. Teori sosial dari Emile Durkheim tentang “fakta sosial” menjelaskan bahwa norma dan nilai dalam masyarakat, seperti Pancasila, akan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, namun tetap menjaga kesatuan dan integritas sosial.

Pada masa Orde Baru, Pancasila kembali dipertegas sebagai sistem etika melalui formulasi P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang bertujuan untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu konsep yang muncul adalah humanisme, yang menekankan pentingnya menjadikan manusia Indonesia sebagai makhluk berbudi pekerti, sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Paham ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki hubungan yang harmonis antara aspek spiritual dan fisik serta menjalankan kewajiban sosialnya dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, sistem etika Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral untuk membentuk karakter bangsa yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan kepentingan bersama. Pandangan ini sejalan dengan teori etika deontologis yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, yang mengutamakan prinsip moralitas dalam setiap tindakan, yang menjadi acuan bagi setiap individu untuk berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika Pancasila sebagai sistem etika menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasinya di masyarakat. Salah satunya adalah munculnya pengaruh ekonomi liberal dan kapitalisme yang mengarah pada individualisme dan materialisme, yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial yang diajarkan oleh Pancasila. Ekonomi kapitalisme sering kali menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana sebagian kecil kelompok menikmati kekayaan yang melimpah, sementara sebagian besar masyarakat lainnya masih hidup dalam kemiskinan. Teori ekonomi dari Karl Marx tentang kapitalisme dan perjuangan kelas menggambarkan bagaimana sistem ekonomi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, yang pada akhirnya mengancam integritas sistem etika Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dalam ekonomi Indonesia agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang adil.

Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga menjadi masalah serius dalam dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Di beberapa kasus, hukum di Indonesia sering kali tidak berpihak pada masyarakat yang lemah atau tidak memiliki kekuasaan, sementara mereka yang memiliki kekayaan atau kekuasaan sering kali mendapatkan perlakuan istimewa. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Menurut teori keadilan dari John Rawls, keadilan adalah tentang menciptakan sistem yang memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Dengan demikian, untuk mewujudkan Pancasila sebagai sistem etika yang efektif, perlu ada komitmen kuat dari semua elemen negara untuk menegakkan keadilan dan mengatasi ketimpangan yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum dan konstitusi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang membentuk arah dan tujuan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai luhur yang mencerminkan pandangan hidup bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan ketuhanan, yang harus diinternalisasi dan diwujudkan oleh setiap individu maupun lembaga negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam praktiknya, Pancasila memberikan pedoman moral agar setiap kebijakan dan keputusan negara berpihak pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan yang berkeadilan. Meski demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh kapitalisme, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan hukum yang dapat menghambat terwujudnya cita-cita luhur bangsa. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terus memperdalam pemahaman dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kolektif. Etika Pancasila juga menekankan pentingnya semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan moralitas dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan kehidupan berbangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, bangsa Indonesia dapat terus menjaga kedaulatan, menciptakan keadilan, dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta inspirasi dalam penulisan artikel ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan menyimak tulisan ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan getahuan kita semua.

REFERENSI | REFERENCE

- Aisyah, f. N., & najicha, f. U. Peran pancasila di era digital dalam mewujudkan penggunaan Teknologi yang bertanggung jawab dan beretika.
- Amri, s. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of midwifery*, 8(01), 760-768
- Astuti, n. (2023). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa. *Prosiding Seminar nasional pendidikan fkip unmas*, 333–338.
- Gracya, s. T., & najicha, f. U. (2023). Pentingnya peran pancasila sebagai sistem etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
- Huda, m. C. (2018). Meneguhkan pancasila sebagai ideologi bernegara. *Resolusi: jurnal sosial Politik*, 1(1), 78-99.
- Julmulyani, J., Hariyanto, H., Kurniawansyah, E., & Zubair, M. (2021). Pelaksanaan Pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Wawo. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2).
- Lubis, s. H., annisa, f., rahmadani, d. Y., & usiono, u. (2024). Penerapan pancasila sebagai Sistem etika di kalangan masyarakat. *Journal of education religion humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 173-176.
- Mudjiyanto, b., & dunan, a. (2021). Teknologi digital sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila. *Promedia (public relation dan media komunikasi)*, 7(1).
- Nabila, ario pamungkas, et al. “dinamika pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam Menghadapi perkembangan zaman.”
- Triwahyuni, d. (2011). Pancasila sebagai etika (moral) politik
- Ulpah, u. (2021). Urgensi pendidikan karakter dalam membentuk moral peserta didik. *Jurnal Pendidikan tambusai*, 5(2), 2261–2267.

- Wahyuni, s. (2017). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa. *Jurnal Pendidikan dan pembelajaran*, 6(2), 829–835.
- Warsidi, e. (2018). *Pancasila dalam kehidupan bernegara*. Surakarta: sinergi prima magna
- Widiuseno, i. (2014). Azas filosofis Pancasila sebagai ideologi dan Dasar Negara. *Humanika*, 20(2), 62-66.
- Wuryaningsih, s. (2018). Pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik di sekolah dasar. *Jurnal pendidikan: teori, penelitian, dan pengembangan*, 3(5), 653–658
- Yopita, j. (2024). Penerapan nilai-nilai profil pancasila dalam meningkatkan sopan santun Peserta didik kelas iv sdn 1 tulang bawang udik (doctoral dissertation, uin raden intan Lampung)